



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN **NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, perlu menetapkan Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Bagian dari hasil pajak daerah yang selanjutnya disingkat DBH pajak, adalah dana bagian dari realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten.
8. Bagian dari hasil retribusi daerah yang selanjutnya disingkat DBH Retribusi, adalah dana bagian dari realisasi retribusi daerah Kabupaten.
9. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan
10. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang berkaitan dengan jabatan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya seperti tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Para Kepala Seksi serta Para Kepala Urusan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya di singkat PBB.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas daerah yang ditentukan Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening kas desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa serta membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

BAB II
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
DANA BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah
- (2) Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB Perdesaan Tahun Anggaran 2022.

$$\text{DBH Pajak} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{ALOKASI FORMULA}$$

- (3) Alokasi Dasar setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Desa } x = \frac{60\% \times \text{Besaran DBH Pajak Kabupaten Pesawaran}}{\text{Jumlah Desa se-kabupaten Pesawaran}}$$

- (4) Alokasi Formula setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula Desa } x = \left[\frac{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa } x}{\text{Total Realisasi PBB Perdesaan Kabupaten}} \right] \times \left[40\% \times \text{Besaran DBH Pajak Kabupaten} \right]$$

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB Perdesaan Tahun Anggaran 2022.

$$\text{DBH Retribusi} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{ALOKASI FORMULA}$$

- (3) Alokasi Dasar setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Desa } x = \frac{60\% \times \text{Besaran DBH Retribusi Kabupaten Pesawaran}}{\text{Jumlah Desa se-kabupaten Pesawaran}}$$

- (4) Alokasi Formula setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula Desa } x = \left[\frac{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa } x}{\text{Total Realisasi PBB Perdesaan Kabupaten}} \right] \times \left[40\% \times \text{Besaran DBH Retribusi Kabupaten} \right]$$

BAB III

PENYALURAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah ke desa dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dilakukan setelah desa menyampaikan Laporan Realisasi DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dapat dilakukan setelah desa memenuhi capaian pembayaran PBB sesuai target yang ditetapkan.
- (5) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dilakukan setelah Desa mendapatkan rekomendasi Camat.
- (6) Rincian DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah yang diterima setiap desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Pengelolaan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN DANA BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Penyampaian laporan realisasi penggunaan rincian DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah menjadi bagian dari laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran 2024.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah, dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Bupati mengurangi penyaluran rincian DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (2) SiLPA DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (1) jika terdapat :
 - a. Penggunaan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan.
 - b. Sisa DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari bagian yang diterima dari rincian dana bagian hasil pajak daerah dan dana bagian dari hasil retribusi daerah.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran rincian DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah dalam hal capaian realisasi PBB perdesaan tidak mencapai target yang ditentukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 633

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN DANA BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN T.A. 2024

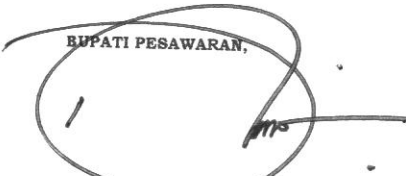
Status Desa	No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	PBB PEDESAAN			Alokasi Formula	PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) + (9)
DESA DEFINITIF	1	GEDONG TATAAN	PADANG RATU	24.060.811	11.418.260	11.418.260	100,0	3.932.202	27.993.013
	2	GEDONG TATAAN	PAMPANGAN	24.060.811	26.146.001	25.325.811	96,9	8.721.663	32.782.473
	3	GEDONG TATAAN	CIPADANG	24.060.811	57.150.940	55.756.695	97,6	19.201.402	43.262.213
	4	GEDONG TATAAN	WAY LAYAP	24.060.811	54.964.259	44.932.054	81,7	15.473.630	39.534.440
	5	GEDONG TATAAN	SUKADADI	24.060.811	20.912.864	20.912.864	100,0	7.201.939	31.262.750
	6	GEDONG TATAAN	GEDUNG TATAAN	24.060.811	105.428.208	89.027.136	84,4	30.659.024	54.719.835
	7	GEDONG TATAAN	BAGELEN	24.060.811	103.514.309	89.696.420	86,7	30.889.511	54.950.322
	8	GEDONG TATAAN	SUKARAJA	24.060.811	102.280.218	92.674.195	90,6	31.914.992	55.975.803
	9	GEDONG TATAAN	KEBAGUSAN	24.060.811	115.285.729	105.159.945	91,2	36.214.815	60.275.626
	10	GEDONG TATAAN	SUNGAI LANGKA	24.060.811	105.112.274	105.112.274	100,0	36.198.398	60.259.209
	11	GEDONG TATAAN	KURUNGAN NYAWA	24.060.811	115.145.070	90.634.413	78,7	31.212.535	55.273.346
	12	GEDONG TATAAN	NEGERI SAKTI	24.060.811	185.391.612	152.854.841	82,4	52.639.908	76.700.719
	13	GEDONG TATAAN	BERNUNG	24.060.811	147.664.761	109.838.900	74,4	37.826.146	61.886.957
	14	GEDONG TATAAN	SUKA BANJAR	24.060.811	31.272.946	29.191.616	93,3	10.052.962	34.113.773
	15	GEDONG TATAAN	WIYONO	24.060.811	94.086.993	80.721.859	85,8	27.798.866	51.859.677
	16	GEDONG TATAAN	TAMAN SARI	24.060.811	77.446.181	72.721.450	93,9	25.043.698	49.104.508
	17	GEDONG TATAAN	BOGOREJO	24.060.811	76.041.429	67.310.316	88,5	23.180.220	47.241.031
	18	GEDONG TATAAN	KARANG ANYAR	24.060.811	42.051.074	39.520.070	94,0	13.609.859	37.670.670
	19	GEDONG TATAAN	KUTOARJO	24.060.811	53.607.934	49.350.724	92,1	16.995.324	41.056.135
	20	NEGERI KATON	KAGUNGAN RATU	24.060.811	73.547.497	59.619.063	81,1	20.531.518	44.592.329
	21	NEGERI KATON	KALI REJO	24.060.811	132.893.187	69.797.221	52,5	24.036.656	48.097.467
	22	NEGERI KATON	PURWOREJO	24.060.811	57.663.555	46.612.987	80,8	16.052.507	40.113.317
	23	NEGERI KATON	PUJO RAHAYU	24.060.811	52.761.336	41.385.071	78,4	14.252.125	38.312.936
	24	NEGERI KATON	NEGERI KATON	24.060.811	122.109.437	79.802.483	65,4	27.482.253	51.543.063
	25	NEGERI KATON	PONCO KRESNO	24.060.811	163.400.220	134.790.957	82,5	46.419.096	70.479.907
	26	NEGERI KATON	HALANGAN RATU	24.060.811	126.159.014	85.431.757	67,7	29.420.853	53.481.664
	27	NEGERI KATON	PEJAMBON	24.060.811	104.763.801	74.261.116	70,9	25.573.925	49.634.736
	28	NEGERI KATON	NEGARA SAKA	24.060.811	87.999.148	49.091.584	55,8	16.906.082	40.966.893
	29	NEGERI KATON	SINAR BANDUNG	24.060.811	80.401.154	74.276.669	92,4	25.579.281	49.640.092
	30	NEGERI KATON	TANJUNG REJO	24.060.811	213.196.311	113.576.893	53,3	39.113.430	63.174.241
	31	NEGERI KATON	ROWO REJO	24.060.811	45.354.061	41.834.079	92,2	14.406.754	38.467.565
	32	NEGERI KATON	TRESNO MAJU	24.060.811	205.434.582	136.694.858	66,5	47.074.758	71.135.569
	33	NEGERI KATON	SIDOMULYO	24.060.811	271.791.872	181.056.115	66,6	62.351.818	86.412.629
	34	NEGERI KATON	LUMBIREJO	24.060.811	166.294.173	130.828.935	78,7	45.054.661	69.115.472
	35	NEGERI KATON	TRI RAHAYU	24.060.811	142.083.117	113.834.145	80,1	39.202.022	63.262.833
	36	NEGERI KATON	BANGUN SARI	24.060.811	115.336.809	94.337.892	81,8	32.487.934	56.548.744
	37	NEGERI KATON	KARANG REJO	24.060.811	63.818.833	41.755.568	65,4	14.379.716	38.440.527
	38	NEGERI KATON	NEGERI ULANGAN JAYA	24.060.811	70.545.175	57.707.481	81,8	19.873.211	43.934.022
	39	NEGERI KATON	PUJODADI	24.060.811	127.378.403	116.677.052	91,6	40.181.058	64.241.869
	40	NEGERI KATON	GRUJUGAN BARU	24.060.811	101.697.113	81.265.680	79,9	27.986.146	52.046.957
	41	TEGINENENG	BUMI AGUNG	24.060.811	56.571.995	55.698.900	98,5	19.181.499	43.242.310
	42	TEGINENENG	KEJADIAN	24.060.811	21.672.524	14.289.965	65,9	4.921.155	28.981.966
	43	TEGINENENG	BATANG HARI OGAN	24.060.811	71.287.645	24.338.512	34,1	8.381.658	32.442.469
	44	TEGINENENG	NEGARA RATU WATES	24.060.811	59.991.446	44.658.444	74,4	15.379.404	39.440.215
	45	TEGINENENG	GUNUNG SUGIH BARU	24.060.811	34.796.723	21.777.242	62,6	7.499.612	31.560.423
	46	TEGINENENG	GEDUNG GUMANTI	24.060.811	185.391.308	109.796.627	59,2	37.811.588	61.872.399
	47	TEGINENENG	KRESNO WIDODO	24.060.811	131.957.610	82.454.029	62,5	28.395.388	52.456.199
	48	TEGINENENG	SINARJATI	24.060.811	89.279.117	57.744.169	64,7	19.885.845	43.946.656
	49	TEGINENENG	MARGO REJO	24.060.811	149.120.009	104.118.330	69,8	35.856.105	59.916.916
	50	TEGINENENG	GERNING	24.060.811	158.792.077	98.009.060	61,7	33.752.205	57.813.015
	51	TEGINENENG	PANCA BAKTI	24.060.811	43.808.586	33.717.212	77,0	11.611.480	35.672.291
	52	TEGINENENG	MARGO MULYO	24.060.811	117.964.587	79.957.861	67,8	27.535.761	51.596.572
	53	TEGINENENG	REJO AGUNG	24.060.811	90.657.737	65.312.714	72,0	22.492.289	46.553.100
	54	TEGINENENG	KOTA AGUNG	24.060.811	69.706.158	52.296.812	75,0	18.009.893	42.070.704
	55	TEGINENENG	TRIMULYO1	24.060.811	194.599.344	122.072.969	62,7	42.039.295	66.100.106
	56	TEGINENENG	SRIWEDARI	24.060.811	83.318.960	60.603.484	72,7	20.870.532	44.931.343
	57	WAY LIMA	PADANG MANIS	24.060.811	16.028.622	12.099.920	75,5	4.166.951	28.227.762
	58	WAY LIMA	BANJAR NEGERI	24.060.811	7.752.762	6.320.288	81,5	2.176.571	26.237.382

Status Desa	No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	PBB PEDESAAN			Alokasi Formula	PAGU RETRIBUSI
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) + (9)
	59	WAY LIMA	SIDODADI1	2,191,555	13,869,053	10,772,575	77.7	337,907	2,529,462
	60	WAY LIMA	PEKONDOH GEDUNG	2,191,555	8,400,525	6,274,425	74.7	196,812	2,388,367
	61	WAY LIMA	PEKONDOH	2,191,555	21,368,507	21,133,857	98.9	662,913	2,854,468
	62	WAY LIMA	KOTA DALAM	2,191,555	25,826,624	20,175,152	78.1	632,841	2,824,396
	63	WAY LIMA	TANJUNG AGUNG1	2,191,555	24,580,668	18,608,719	75.7	583,706	2,775,261
	64	WAY LIMA	GEDONG DALAM	2,191,555	12,011,349	8,599,249	71.6	269,736	2,461,290
	65	WAY LIMA	SINDANG GARUT	2,191,555	37,561,110	27,545,847	73.3	864,041	3,055,595
	66	WAY LIMA	BATURAJA1	2,191,555	38,033,628	28,557,494	75.1	895,773	3,087,328
	67	WAY LIMA	WAY HARONG	2,191,555	34,457,239	25,701,650	74.6	806,193	2,997,748
	68	WAY LIMA	GUNUNG REJO1	2,191,555	29,129,964	21,651,224	74.3	679,142	2,870,696
	69	WAY LIMA	MARGODADI	2,191,555	34,792,210	27,635,710	79.4	866,859	3,058,414
	70	WAY LIMA	CIMANUK	2,191,555	43,801,110	23,297,107	53.2	730,769	2,922,323
	71	WAY LIMA	SUKAMANDI	2,191,555	19,928,409	19,578,988	98.2	614,141	2,805,696
	72	WAY LIMA	PAQUYUBAN	2,191,555	4,414,029	3,520,370	79.8	110,425	2,301,979
	73	PADANG CERMIN	BANJARAN	2,191,555	21,837,488	21,837,488	100.0	684,984	2,876,539
	74	PADANG CERMIN	DURIAN	2,191,555	37,382,966	27,841,100	74.5	873,302	3,064,857
	75	PADANG CERMIN	HANAU BERAK	2,191,555	48,323,786	47,010,623	97.3	1,474,599	3,666,154
	76	PADANG CERMIN	PAYA	2,191,555	22,786,031	22,786,031	100.0	714,738	2,906,292
	77	PADANG CERMIN	PADANG CERMIN	2,191,555	20,194,821	20,194,821	100.0	633,458	2,825,013
	78	PADANG CERMIN	SANGGI	2,191,555	43,259,396	34,835,954	80.5	1,092,712	3,284,267
	79	PADANG CERMIN	TAMBANGAN	2,191,555	19,180,234	18,677,130	97.4	585,852	2,777,407
	80	PADANG CERMIN	WAY URANG	2,191,555	43,149,040	38,049,995	88.2	1,193,528	3,385,083
	81	PADANG CERMIN	KHEPONG JAYA	2,191,555	15,022,531	14,647,531	97.5	459,454	2,651,009
	82	PADANG CERMIN	TRIMULYO	2,191,555	8,275,071	8,275,071	100.0	259,567	2,451,122
	83	PADANG CERMIN	GAYAU	2,191,555	15,326,051	15,326,051	100.0	480,738	2,672,293
	84	PADANG CERMIN	DANTAR	2,191,555	8,860,886	8,860,886	100.0	277,943	2,469,497
	85	PUNDUH PEDADA	BAWANG	2,191,555	31,833,053	31,833,053	100.0	998,519	3,190,074
	86	PUNDUH PEDADA	BANDING AGUNG	2,191,555	23,127,697	23,127,697	100.0	725,455	2,917,010
	87	PUNDUH PEDADA	BATU RAJA	2,191,555	41,179,671	40,638,071	98.7	1,274,709	3,466,264
	88	PUNDUH PEDADA	SUKAJAYA PIDADA	2,191,555	15,815,714	12,940,139	81.8	405,898	2,597,453
	89	PUNDUH PEDADA	RUSABA	2,191,555	12,791,019	12,791,019	100.0	401,221	2,592,775
	90	PUNDUH PEDADA	KOTA JAWA	2,191,555	34,323,777	34,323,777	100.0	1,076,646	3,268,201
	91	PUNDUH PEDADA	SUKARAME	2,191,555	70,649,537	67,702,674	95.8	2,123,654	4,315,209
	92	PUNDUH PEDADA	PAGAR JAYA	2,191,555	97,550,220	63,542,421	65.1	1,993,158	4,184,713
	93	PUNDUH PEDADA	PULAU LEGUNDI	2,191,555	91,481,820	34,171,320	37.4	1,071,864	3,263,419
	94	PUNDUH PEDADA	SUKA MAJU	2,191,555	38,661,378	24,777,161	64.1	777,194	2,968,749
	95	PUNDUH PEDADA	BANGUN REJO	2,191,555	39,067,471	29,456,505	75.4	923,973	3,115,528
	96	KEDONDONG	WAY KEPAYANG	2,191,555	36,864,213	31,887,196	86.5	1,000,217	3,191,772
	97	KEDONDONG	SUKA MAJU1	2,191,555	18,018,882	18,018,882	100.0	565,205	2,756,760
	98	KEDONDONG	KEDONDONG	2,191,555	19,254,438	19,254,438	100.0	603,961	2,795,516
	99	KEDONDONG	PASAR BARU	2,191,555	25,972,970	23,876,851	91.9	748,954	2,940,509
	100	KEDONDONG	TEMPEL REJO	2,191,555	18,318,402	18,318,402	100.0	574,600	2,766,155
	101	KEDONDONG	KERTASANA	2,191,555	32,578,953	27,450,203	84.3	861,040	3,052,595
	102	KEDONDONG	GUNUNG SUGIH	2,191,555	27,045,753	22,471,549	83.1	704,873	2,896,428
	103	KEDONDONG	SINAR HARAPAN	2,191,555	18,011,620	12,941,557	71.9	405,942	2,597,497
	104	KEDONDONG	TEBA JAWA	2,191,555	28,973,316	26,429,745	91.2	829,031	3,020,586
	105	KEDONDONG	BABAKAN LOA	2,191,555	46,842,505	46,671,505	99.6	1,463,962	3,655,517
	106	KEDONDONG	PESAWARAN	2,191,555	23,533,513	23,533,513	100.0	738,184	2,929,739
	107	KEDONDONG	HARAPAN JAYA1	2,191,555	27,394,979	27,394,979	100.0	859,308	3,050,863
	108	MARGA PUNDUH	SUKAJAYA PUNDUH	2,191,555	20,172,108	20,172,108	100.0	632,746	2,824,301
	109	MARGA PUNDUH	MAJA	2,191,555	30,861,225	20,736,698	67.2	650,455	2,842,010
	110	MARGA PUNDUH	PENYANDINGAN	2,191,555	57,207,973	57,207,973	100.0	1,794,463	3,986,018
	111	MARGA PUNDUH	TAJUR	2,191,555	31,454,361	18,232,683	58.0	571,911	2,763,466
	112	MARGA PUNDUH	UMBUL LIMUS	2,191,555	12,133,982	12,133,982	100.0	380,611	2,572,166
	113	MARGA PUNDUH	PEKON AMPAI	2,191,555	29,031,737	20,620,492	71.0	646,810	2,838,365
	114	MARGA PUNDUH	KUNYAJAN	2,191,555	16,306,759	16,306,759	100.0	511,500	2,703,055
	115	MARGA PUNDUH	KEKATANG	2,191,555	19,272,412	12,511,231	64.9	392,444	2,583,999
	116	MARGA PUNDUH	KAMPUNG BARU	2,191,555	40,564,312	26,631,186	65.7	835,350	3,026,905
	117	MARGA PUNDUH	PULAU PAHAWANG	2,191,555	65,066,445	42,617,107	65.5	1,336,786	3,528,341
	118	WAY KHILAU	PENENGAHAN	2,191,555	23,232,608	23,232,608	100.0	728,746	2,920,300
	119	WAY KHILAU	SUKA JAYA	2,191,555	5,708,848	5,708,848	100.0	179,071	2,370,626
	120	WAY KHILAU	PADANG CERMIN1	2,191,555	5,459,335	5,459,335	100.0	171,245	2,362,800
	121	WAY KHILAU	BAYAS JAYA	2,191,555	30,838,939	30,838,939	100.0	967,336	3,158,891
	122	WAY KHILAU	TANJUNG KERTA	2,191,555	10,739,398	10,739,398	100.0	336,867	2,528,421
	123	WAY KHILAU	KOTA JAWA1	2,191,555	36,932,667	36,932,667	100.0	1,158,480	3,350,035
	124	WAY KHILAU	GUNUNG SARI	2,191,555	36,347,799	36,347,799	100.0	1,140,135	3,331,689
	125	WAY KHILAU	MADA JAYA	2,191,555	27,010,203	27,010,203	100.0	847,239	3,038,794
	126	WAY KHILAU	KUBU BATU	2,191,555	12,678,707	12,678,707	100.0	397,698	2,589,252

Status Desa	No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	PBB PEDESAAN			Alokasi Formula	PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5) + (9)
	132	TELUK PANDAN	HURUN	24.060.811	141.328.643	64.460.079	45,6	22.198.660	46.259.471
	133	TELUK PANDAN	MUNCA	24.060.811	42.826.821	35.885.553	83,8	12.358.210	36.419.021
	134	TELUK PANDAN	SIDODADI	24.060.811	77.073.839	63.666.333	82,6	21.925.311	45.986.122
	135	TELUK PANDAN	SUKAJAYA LEMPASING	24.060.811	113.342.200	66.498.741	58,7	22.900.731	46.961.542
	136	TELUK PANDAN	TALANG MULYO	24.060.811	14.524.739	9.434.040	65,0	3.248.880	27.309.691
	137	TELUK PANDAN	TANJUNG AGUNG	24.060.811	59.586.601	53.251.837	89,4	18.338.783	42.399.594
	138	WAY RATAI	BUNUT	24.060.811	58.450.645	57.813.145	98,9	19.909.599	43.970.410
	139	WAY RATAI	BUNUT SEBERANG	24.060.811	24.064.721	24.064.721	100,0	8.287.370	32.348.181
	140	WAY RATAI	WATES WAY RATAI	24.060.811	54.873.396	54.073.803	98,5	18.621.851	42.682.661
	141	WAY RATAI	CERINGIN ASRI	24.060.811	32.661.021	32.661.021	100,0	11.247.751	35.308.561
	142	WAY RATAI	SUMBER JAYA	24.060.811	76.571.914	66.321.752	86,6	22.839.780	46.900.591
	143	WAY RATAI	MULYOSARI	24.060.811	54.023.559	53.458.794	99,0	18.410.055	42.470.866
	144	WAY RATAI	PONCOREJO	24.060.811	38.725.000	38.725.000	100,0	13.336.054	37.396.865
	145	WAY RATAI	GUNUNG REJO	24.060.811	58.285.452	57.632.787	98,9	19.847.488	43.908.299
	146	WAY RATAI	PESAWARAN INDAH	24.060.811	82.792.937	81.836.362	98,8	28.182.677	52.243.487
	147	WAY RATAI	HARAPAN JAYA	24.060.811	62.627.125	53.594.690	85,6	18.456.854	42.517.665
	148	WAY RATAI	KALIREJO	24.060.811	35.359.886	30.788.851	87,1	10.603.016	34.663.826
				3.561.000.000	8.934.135.500	6.893.579.569	77,2	2.374.000.000	5.935.000.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Kab PESAWARAN	5.935.000.000
Hasil Perhitungan	5.935.000.000
Pagu Alokasi Dasar	3.561.000.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	3.561.000.000
Pagu Alokasi Formula	2.374.000.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	2.374.000.000
Jumlah Desa Definitif	148

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.